

Perpustakaan Um Surabaya

file bu GIta feb 11

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3248462182

Submission Date

May 13, 2025, 10:50 AM GMT+7

Download Date

May 13, 2025, 11:46 AM GMT+7

File Name

mimin,_260-280.pdf

File Size

514.5 KB

21 Pages

5,936 Words

38,614 Characters

11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Exclusions

- 3 Excluded Sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0% Internet sources
0% Publications
11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	Universitas Jenderal Soedirman	1%
2	Student papers	
	Universitas Diponegoro	<1%
3	Student papers	
	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1%
4	Student papers	
	Universitas Negeri Jakarta	<1%
5	Student papers	
	Sriwijaya University	<1%
6	Student papers	
	Universitas Muria Kudus	<1%
7	Student papers	
	Universitas Sam Ratulangi	<1%
8	Student papers	
	Universitas Tanjungpura	<1%
9	Student papers	
	University of Muhammadiyah Malang	<1%
10	Student papers	
	Universitas Pamulang	<1%
11	Student papers	
	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	<1%

12	Student papers	Universitas Islam Malang	<1%
13	Student papers	Politeknik Negeri Jember	<1%
14	Student papers	Ajou University Graduate School	<1%
15	Student papers	Universitas Negeri Padang	<1%
16	Student papers	Universitas Bangka Belitung	<1%
17	Student papers	IAIN Pontianak	<1%
18	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya	<1%
19	Student papers	Udayana University	<1%
20	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta	<1%
21	Student papers	Universitas Papua	<1%
22	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia	<1%
23	Student papers	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur	<1%
24	Student papers	Bellevue Public School	<1%
25	Student papers	Universitas Mulawarman	<1%

26	Student papers	
Sharda University		<1%
27	Student papers	
Universitas PGRI Palembang		<1%
28	Student papers	
Universitas Respati Indonesia		<1%

EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA KARANGTINOTO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY

Eka Fatma Yuli Tantri, Gita Desi Pradani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

ekafatmay39@mail.com, gitadesipradani@um-surabaya.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the financial performance of the Karangtinoto Village Government through the Value for Money approach. The type of data used in this research is secondary data. The results of this study indicate that the concept of measuring the performance of the Karangtinoto Village Government applies the Value for Money approach. By using this approach, the village government can measure the overall performance of public sector organizations, this will result in improved performance in the future. The performance of the Karangtinoto Village Government in 2020-2021 in terms of the economy is at an average ratio of 95.14% which indicates that this ratio is quite economical. The performance of the Karangtinoto Village Government in 2020-2021 in terms of efficiency is at an average ratio of 98.65% which indicates that this ratio is efficient. The performance of the Karangtinoto Village Government in 2020-2021 in terms of effectiveness is at an average ratio of 99.04% which indicates that this ratio is quite effective.

Keywords: Financial Performance, Value for Money, Economy, Efficiency, Effectiveness.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangtinoto melalui pendekatan *Value For Money*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengukuran kinerja Pemerintah Desa Karangtinoto menerapkan pendekatan *Value For Money*. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemerintah desa dapat mengukur kinerja organisasi sektor publik secara menyeluruh, hal tersebut berakibat pada peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Kinerja Pemerintah Desa Karangtinoto di tahun 2020-2021 dari segi ekonomi berada pada rasio rata-rata 95,14% yang menunjukkan bahwa rasio ini bernilai cukup ekonomis. Kinerja Pemerintah Desa Karangtinoto di tahun 2020-2021 dari segi efisien berada pada rasio rata-rata 98,65% yang menunjukkan bahwa rasio ini bernilai efisien. Kinerja Pemerintah Desa Karangtinoto di tahun 2020-2021 dari segi efektif berada pada rasio rata-rata 99,04% yang menunjukkan bahwa rasio ini bernilai cukup efektif

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, *Value For Money*, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas.

Submitted: 07 September 2022

Revised: 12 Oktober 2022

Accepted: 26 November 2022

Email korespondensi : ekafatmay39@gmail.com

PENDAHULUAN

12 Dalam suatu organisasi sektor publik, pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menilai pertanggungjawaban organisasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum dan supaya tepat sasaran. Terdapat tiga hal yang menjadi alasan mengapa pengukuran kinerja penting untuk dilakukan, antara lain : untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan serta mengimplementasikan pertanggungjawaban kepada publik. Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber dananya, tak lepas dari tata cara pengelolaan keuangan yang baik. Terdapat desa yang mampu mengelola keuangan desanya dengan baik, namun ada pula desa yang belum mampu memaksimalkan anggaran dana yang diperolehnya (Seran, 2021). Pengukuran kinerja yang terdapat dalam pemerintah desa dapat ditinjau melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan bentuk manifestasi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pendapatan dan belanja desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam proses penyusunan APBDes, karena masyarakat lebih mengetahui persoalan dan potensi sumber daya yang ada (Priandani et al., 2017).

Indonesia dikenal dengan negara agraris. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase jumlah penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan adalah 43,3 % dari total seluruh penduduk yaitu 272.229.372 jiwa (Administrasi Kependudukan (Adminduk), 2021). Tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan dilihat dari aspek pembangunan wilayah dapat dinilai masih tertinggal jika di bandingkan dengan perkotaan. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Tahun 2020 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB hanya 13,45% pada kuartal III tahun 2019. Jumlah tersebut merupakan urutan kedua setelah sektor Industri yaitu sebesar 19,62%. Alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian akan sulit menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa, apalagi banyak petani yang tidak mempunyai sawah sendiri, melainkan hanya sebagai petani gurem. Melihat kondisi tersebut, pemerintah desa perlu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan pendapatan dan belanja desa. Dalam praktiknya, APBDes memiliki pengaruh yang cukup besar untuk proses pembangunan desa. Itulah alasan kenapa peneliti mengambil APBDes sebagai bahan penelitian. APBDes yang

dikelola dengan amanah dan jujur akan menghasilkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa. Dampak yang akan dirasakan adalah terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Desa Karangtinoto.

Desa Karangtinoto merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Potensi sumber daya alam di Desa Karangtinoto adalah di bidang pertanian. Sejalan dengan tujuan pembangunan desa yaitu terciptanya kebutuhan yang dapat dipenuhi dan dapat menjadikan masyarakat desa menjadi lebih sejahtera, maka harus ada sumber dan potensi lain selain pertanian yang bisa di manfaatkan dalam masyarakat. Namun, masih sedikit minat masyarakat untuk mengolah potensi tersebut. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan diversifikasi kegiatan pertanian, seperti industri pengolah hasil produk pertanian atau produk penunjang. Jika hal ini di terapkan maka akan berpeluang mengalihkan tenaga kerja di bidang pertanian yang kurang produktif. Selain itu juga dapat memberi nilai tambah dari produk pertanian dengan membangun UMKM. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, perlu diiringi langkah pemberdayaan masyarakat desa dengan disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian peran Pemerintah Desa menjadipenghubung untuk mewujudkan pembangunan desa. Desa juga memiliki wewenang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan, ekonomis, efisien dan efektif yang dalam penerapannya dapat diukur dengan menggunakan konsep *Value For Money* . Penelitian ini telah dilakukan oleh Nurlayly Magfiroh (2021) dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan pendekatan *value for money* menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto belum optimal jika ditinjau dari segi efisiensi dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini terjadi karena kurang matangnya perencanaan dan pengendalian belanja atas pengadaan barang dan jasa, yang mengakibatkan realisasi belanja desa lebih tinggi dari pada pendapatan yang diterima oleh desa (Magfiroh et al., 2021) .

Berdasarkan penjelasan diatas dalam realisasi pelaksanaan APBDes, maka sangat diperlukan upaya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah desa melalui pendekatan *value for money*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas pada organisasi sektor publik. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Melalui Pendekatan *Value For Money*”.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan perwujudan dari berhasil atau gagalnya kinerja operasional sehingga menjadi tolak ukur suatu organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya (Mulyadi, 2009:248).

b. Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan penilaian kinerja yang terdapat pada organisasi sektor publik menurut Mahmudi (2007) adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian suatu organisasi sektor publik
- 2) Sebagai sarana pembelajaran untuk pegawai
- 3) Sebagai bahan perbaikan kinerja untuk periode yang akan datang
- 4) Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan
- 5) Agar tercipta sistem akuntabilitas

c. Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009:122) Penilaian kinerja bermanfaat untuk :

- 1) Memberikan informasi terkait penilaian untuk mengukur kinerja
- 2) Sebagai petunjuk arah untuk menentukan target kinerja
- 3) Sebagai bahan evaluasi terhadap penilaian kinerja
- 4) Mengidentifikasi kepuasan masyarakat
- 5) Sebagai bentuk pasti bahwa pengambilan keputusan berdasarkan data yang obyektif

2. Pemerintahan Desa

Desa merupakan pemerintahan terendah dibawah camat yang memiliki hak untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri dan memiliki tiga unsur dasar yaitu daerah, penduduk dan tata kehidupan desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Sujarweni (2015:24) , Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa telah disepakati oleh Pemerintah Desa beserta Badan Permasyarakatan Desa. APBDes berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena sebagai rencana strategis yang sudah terukur. Dengan adanya APBDes diharapkan aparatur desa memiliki semangat kerja yang baik dalam mengelola anggaran desa tersebut. Berikut merupakan 6 fungsi APBDes menurut Ardi Hamzah (dalam Yuliansyah & Rusmianto, 2015) yaitu: Fungsi Otorisasi, Fungsi Perencanaan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi dan Fungsi Akuntabilitas.

b. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas :

- 1) Pendapatan Desa, meliputi : Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain.
- 2) Belanja Desa, meliputi : Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- 3) Pembiayaan Desa, meliputi : Penerimaan pembayaran dan Pengeluaran pembayaran

4. Value For Money

a. Pengertian Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018:5) Value For Money merupakan konsep pengukuran kinerja yang dapat digunakan dalam suatu organisasi sektor publik yang mendasar melalui tiga komponen, meliputi ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Value For Money merupakan sarana pengevaluasian suatu organisasi sektor publik berdasarkan pemasukan, pengeluaran dan hasil yang telah dijalankan. Agar dapat mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi dan efektifitas suatu organisasi pemerintahan harus dapat menelaah tingkat input, output dan outcome. Input merupakan semua jenis sumber daya

masukan yang digunakan untuk menghasilkan output. *Output* merupakan hasil dari suatu proses. Dan *Outcome* merupakan dampak suatu program kepada masyarakat.

b. Tujuan *Value For Money*

Tujuan *Value For Money* antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efektifitas pelayanan publik sehingga sesuai sasaran
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 3) Menurunkan biaya pelayanan dikarenakan penghematan penggunaan input
- 4) Mengalokasikan belanja yang berorientasi untuk kepentingan umum
- 5) Meningkatkan uang publik sebagai akar akuntabilitas publik dilaksanakan

c. Pengukuran *Value For Money*

1) Ekonomi

Pengertian Ekonomi menurut Mahmudi (2016:21) merupakan pengkaitan antara input primer berupa anggaran dan kas, input sekunder berupa tenaga kerja, bahan dan infrastruktur serta barang modal yang digunakan untuk kegiatan operasional. Konsep ekonomi disini berkonsep pada penghematan penggunaan anggaran oleh suatu organisasi atau instansi untuk pemerolehan input. Konsep ekonomi sering disebut juga dengan tepat guna yang mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan di dalamnya dilakukan secara hati-hati, cermat serta tidak menimbulkan pemborosan.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Anggaran Belanja Desa}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat ekonomis menurut Mahmudi (2015) adalah sebagai berikut :

- a) > 100% : Ekonomis
- b) 85% - 100% : Cukup Ekonomis
- c) 65% - 84% : Kurang Ekonomis
- d) < 65% : Tidak Ekonomis

2) Efisiensi

Efisiensi memiliki pengertian yang berkaitan dengan konsep produktifitas (Mardiasmo, 2018:165). Aktifitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dapat dikatakan efisien jika sumber daya dan dana yang digunakan menghasilkan biaya

serendah mungkin. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan output dengan input, lalu dihubungkan dengan target yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2018:5)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisien menurut Mahmudi (2015) adalah sebagai berikut :

- a) < 90% : Sangat Efisien
- b) 90% - 99% : Efisien
- c) 100% : Cukup Efisien
- d) >100% : Tidak Efisien

3) Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2018:166) merupakan hubungan dalam mencapai tujuan berupa target kebijakan. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila aktifitas yang dilakukan dapat mencapai sasaran akhir suatu kebijakan. Ekonomi berfokus pada input, efisien berfokus pada output atau proses dan efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2015) adalah sebagai berikut :

- a) > 100% : Efektif
- b) 85% - 99% : Cukup Efektif
- c) 65% - 84% : Kurang Efektif
- d) < 65% : Tidak Efektif

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Magfiroh et al. (2021) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasar pada suatu langkah dengan menggunakan data deskriptif sebagai acuan berupa tulisan dan kata-kata secara lisan dan perilaku yang dapat diamati. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menemukan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap berbagai situasi sosial yang kompleks, mampu memahami interaksi dalam situasi sosial sehingga dapat ditemukan pola hubungan yang dapat dikembangkan (Sugiyono, 2013:290). Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana para pelaku dapat menelaah sistem evaluasi kinerja keuangan pemerintah Desa Karangtinoto melalui data yang sudah terkumpul dan dijelaskan melalui kata-kata dalam penelitian ini.

Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument atau alat penelitian (Sugiyono, 2013:222). Untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti harus melakukan wawancara secara langsung dengan menggunakan alat bantu. Keberadaan peneliti ditempat penelitian dapat menunjang keabsahan data dan orisinilitas tulisan. Selain itu, peneliti juga memiliki andil sebagai pengamat partisipatif agar data yang dikumpulkan menjadi lengkap yang berhubungan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pemerintah Desa Karangtinoto yang beralamatkan di Jl. Raya Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai sejak peneliti melakukan observasi di Desa Karangtinoto yang bertepatan pada bulan Desember Tahun 2021 sampai bulan Juni 2022

Sumber Data

1. Data primer, diperoleh melalui melalui proses wawancara secara langsung kepada narasumber dan observasi di tempat terjadinya kegiatan yaitu di Desa Karangtinoto.
2. Data sekunder, diperoleh melalui dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai pendukung dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Karangtinoto tahun

2020-2021.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara akan berlangsung dengan baik jika terjadi hubungan (*rapport*) antara peneliti dengan narasumber (Sugiyono, 2013:239). Peneliti perlu membuat rangkuman terhadap hasil wawancara dari sumber data yang dianggap penting. Dalam hal ini peneliti dapat mendapat data tentang kinerja keuangan pada Pemerintah Desa Karangtinoto secara akurat melalui wawancara dengan melibatkan 5 informan yang meliputi 3 aparatur desa dan 2 masyarakat.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui proses kinerja keuangan pada APBDes Karangtinoto. Peneliti melakukan observasi dengan melihat catatan laporan realisasi APBDes yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomis, efisien dan efektivitas pada pendekatan *value for money* dan mengamati realisasi program unggulan desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menggali informasi melalui catatan dari lembaga atau organisasi atau perorangan. Dokumentasi dapat dilakukan dengan melakukan pengambilan gambar agar lebih akurat. Dokumen yang diperlukan antara lain arsip asli pemerintah desa berupa : data kependudukan, struktur organisasi pemerintah desa, peta wilayah, arsip laporan pertanggungjawaban realisasi APBdes pada Desa Karangtinoto tahun 2020-2021 dan realisasi program prioritas desa.

Analisis Data

1. Mengidentifikasi rincian yang terdapat dalam realisasi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Karangtinoto tahun 2020-2021
2. Melakukan langkah pengukuran dengan menggunakan pendekatan *Value For Money* yang terdiri dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang termuat dalam anggaran dan realisasi pada pendapatan ataupun belanja desa.
3. Menganalisis persentase hasil pengukuran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan kriteria, yaitu ekonomi, efisien dan efektif dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa, lalu ditarik kesimpulan.

Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2013:241) untuk menguji keabsahan atau kredibilitas data, data dapat

menggunakan Triangulasi data berdasarkan data yang diperoleh. Triangulasi merupakan cara untuk mengetahui data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2013 : 241).

Hal tersebut dapat dicapai dengan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan kepada narasumber meliputi kepala desa, bendahara desa dan masyarakat melalui pertanyaan yang sudah diberikan.
2. Membandingkan data hasil pengamatan kepada narasumber dengan dokumen-dokumen mengenai kinerja keuangan meliputi realisasi pendapatan dan belanja desa pada Desa Karangtinoto.
3. Menarik kesimpulan dari kesepakatan antara kedua sumber data tersebut

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2013 : 253) adalah sebagai berikut :

1. Tahap memilih situasi sosial, dilakukan dengan memilih fenomena yang akan dijadikan sebagai fokus pembahasan dan melakukan observasi ke lapangan, yaitu Desa Karangtinoto, penyusunan usulan, seminar proposal dan mengurus perizinan.
2. Tahap pelaksanaan observasi partisipan, dilakukan setelah peneliti memasuki lapangan, menetapkan informan dan melakukan wawancara.
3. Tahap analisis data, dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan menjelaskannya dalam bentuk narasi.
4. Tahap menulis laporan penelitian kualitatif, dilakukan dengan menyusun hasil penelitian dari proses pengumpulan data hingga menganalisis data dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban periode tahun 2020-2021. Data ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangtinoto. Penelitian ini menggunakan pendekatan *value for money* meliputi segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Dibawah ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja desa dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban periode 2020-2021

Tabel 4.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Karangtinoto Tahun 2020-2021

No	Pendapatan	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	2020	681.624.200	639.312.200	42.312.000
		2021	580.327.000	553.650.000	26.677.000
2	Pendapatan Transfer	2020	1.501.246.600	1.493.615.600	7.631.000
		2021	1.376.702.000	1.409.761.361	(33.059.361)
3	Pendapatan Lain-lain	2020	1.970.400	2.666.743	(696.343)
		2021	1.623.540	1.996.333	(372.794)

Sumber : Pemerintah Desa Karangtinoto, Tahun 2022, data diolah

Tabel tersebut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi pendapatan desa Karangtinoto tahun 2020-2021. Pada Pendapatan Asli Desa tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Pendapatan Asli Desa (PAD) mengalami penurunan disebabkan karena harga lelang tanah tiap tahun berfluktuasi dan untuk tahun 2021 mengalami penurunan. Pendapatan asli desa dapat ditingkatkan dengan cara menggali potensi-potensi yang ada di desa. Pendapatan transfer desa tahun 2020 sebesar Rp. 1.501.246.600,- terealisasi menjadi Rp. 1.493.615.600,-, tahun 2021 mengalami penurunan. Pemerintah Desa Karangtinoto dalam merealisasikan pendapatan transfer pada tahun 2020 sudah memaksimalkan pemakaian anggaran yang diterima dan untuk tahun 2021 terjadi selisih lebih pada realisasi anggaran sejumlah Rp. 33.059.361,- dikarenakan karena faktor pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pada pendapatan lain-lain juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp. 1.970.400,- teralisasi sebesar Rp. 2.666.743,-, sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp. 1.623.540,- terealisasi sebesar Rp. 1.996.333,-. Pada tahun 2021 jumlah realisasi pendapatan lain-lain lebih banyak dari pada anggaran yang di tetapkan. Hal ini terjadi karena bunga bank yang tidak dapat diprediksi.

Tabel 4.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Karangtinoto Tahun 2020-2021

No	Belanja	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2020	979.650.425	955.654.665	23.995.761
		2021	772.543.234	764.784.786	7.758.448
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2020	852.588.186	821.224.500	31.363.686
		2021	995.899.400	951.615.252	44.284.148

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	2020	70.636.404	38.566.000	32.070.404
		2021	64.988.000	46.327.000	18.661.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2020	15.080.000	10.080.000	5.000.000
		2021	13.080.000	0	13.080.000
5	Bidang Tak Terduga	2020	301.587.200	270.312.300	31.274.900
		2021	186.600.000	186.000.000	600.000

Sumber : Pemerintah Desa Karangtinoto, Tahun 2022, data diolah

Tabel tersebut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja desa Karangtinoto tahun 2020-2021. Anggaran belanja pemerintah Desa Karangtinoto mengalami fluktuasi untuk setiap bidangnya. Pada tahun 2020 dan 2021, hampir di semua bidang anggaran sudah terserap dengan baik. Realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran mengandung arti bahwa Pemerintah Desa Karangtinoto dapat merealisasikan setiap anggaran yang diterima dengan baik dan perencanaan yang matang. Anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 tidak terserap dengan baik karena terkendala program kerja yang tidak berjalan, yaitu peningkatan kapasitas aparatur desa. Khusus untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2021, anggaran sebesar Rp. 13.080.000,- cukup disayangkan karena tidak digunakan untuk merealisasikan program kerja yang telah direncanakan.

Hasil Penelitian

(a) Analisis Rasio Ekonomis

Konsep ekonomis dalam organisasi sektor publik erat kaitannya dengan biaya organisasi sektor publik dalam melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu pelayanan publik. Konsep ekonomis berdasar pada sumber daya masukan (*input*) hendaknya diperoleh dengan kualitas baik dan harga yang lebih rendah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pemborosan dalam mengelola keuangan dan mengantisipasi terjadinya hal tidak produktif. Yang dimaksud *input* dapat berupa tenaga kerja (tenaga dan keahlian), serta aset-aset yang meliputi gedung dan peralatan. Rasio ekonomis dapat diketahui dengan membandingkan target realisasi dan anggaran belanja beserta tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Anggaran Belanja Desa}} \times 100\%$$

Tabel dibawah ini menyajikan rekapitulasi perhitungan rasio ekonomis Pemerintah Desa Karangtinoto tahun 2020-2021:

Tabel 4.3 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Desa Karangtinoto tahun 2020-2021

Tahun	Anggaran Belanja Desa (Rp)	Realisasi Belanja Desa (Rp)	% Rasio Ekonomis	Kriteria
2020	2.219.542.215	2.095.837.465	94,43	Cukup Ekonomis
2021	2.033.110.634	1.948.727.038	95,85	Cukup Ekonomis
Rata-rata			95,14	Cukup Ekonomis

Sumber : Pemerintah Desa Karangtinoto, Tahun 2022, data diolah

Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020-2021 pemerintah Desa Karangtinoto berhasil untuk meningkatkan nilai rasio ekonomisnya sebesar 1,42%. Dengan demikian, kinerja keuangan pemerintah Desa Karangtinoto pada tahun 2020-2021 dengan pendekatan *value for money* termasuk dalam kriteria cukup ekonomis karena berada di angka 95,14%. Artinya pemerintah Desa Karangtinoto mampu meminimalisir *input* primer meliputi anggaran menjadi *input* sekunder berupa bahan baku, tenaga kerja, sarana infrastruktur serta barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasional dengan tidak membiarkan pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

(b) Analisis Rasio Efisiensi

Konsep efisiensi dalam organisasi sektor publik erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya serta anggaran seminimal mungkin yang digunakan untuk menghasilkan *output*. Efisiensi dapat diketahui dengan membandingkan rasio antara *input* dan *output*. Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila mampu menggunakan *input* serendah-rendahnya dan menghasilkan *output* sebanyak-banyaknya. Rumus untuk menghitung efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Tabel dibawah ini menyajikan rekapitulasi perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Desa Karangtinoto tahun 2020-2021.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Karangtinoto tahun 2020-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Desa (Rp)	Realisasi Belanja Desa (Rp)	% Rasio Efisiensi	Kriteria
2020	2.135.594.544	2.095.837.465	98,14	Efisien
2021	1.965.407.694	1.948.727.038	99,15	Efisien
Rata-rata			98,65	Efisien

Sumber : Pemerintah Desa Karangtinoto, Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2020 menunjukkan angka 98,14%. Angka ini menunjukkan arti bahwa pemerintah Desa Karangtinoto efisien dalam mengelola keuangannya. Dan angka tersebut meningkat di tahun 2021 dengan persentase 99,15%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, pemerintah Desa Karangtinoto berhasil untuk meningkatkan nilai rasio efisiensinya sebesar 1,01%. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020-2021, kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money* pemerintah Desa Karangtinoto mengalami peningkatan pada aspek efisiensi karena pendapatan yang diterima lebih besar dari belanja yang dialokasikan. Persentase rasio efisiensi tahun 2020-2022 berada di angka 98,5% menunjukkan bahwa pemerintah Desa Karangtinoto mampu menggunakan sumber daya yang dibutuhkan dengan seminimal mungkin.

(c) Analisis Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas dapat dikatakan efektif apabila suatu program atau kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diinginkan. Jika kontribusi output terhadap pencapaian tujuan semakin besar, maka semakin efektif pula suatu program atau kegiatan. Agar dapat menghitung rasio efektivitas, maka diperlukan dua macam data, yaitu realisasi pendapatan desa dan anggaran pendapatan desa. Rumus untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel dibawah ini menyajikan rekapitulasi perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Desa Karangtinoto tahun 2020-2021.

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Desa Karangtinoto Tahun 2020-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan Desa (Rp)	Realisasi Pendapatan Desa (Rp)	% R.Efektivitas	Kriteria
2.020	2.184.841.200	2.135.594.544	97,75	Cukup Efektif
2.021	1.958.652.540	1.965.407.694	100,34	Efektif
Rata-rata			99,04	Cukup Efektif

Sumber : Pemerintah Desa Karangtinoto, Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2020 menunjukkan angka 97,75%. Angka ini menunjukkan arti bahwa pemerintah Desa Karangtinoto cukup efektif dalam mengelola keuangannya. Angka tersebut meningkat di tahun 2021 dengan persentase 100,34%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, pemerintah Desa Karangtinoto berhasil untuk meningkatkan nilai rasio efektivitasnya sebesar 2,60%. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020-2021, kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money* pemerintah Desa Karangtinoto mengalami peningkatan pada aspek efektivitas karena realisasi pendapatan yang diterima lebih besar dari anggaran yang dirumuskan. Hal ini terjadi karena terdapat penerimaan dana yang tidak dianggarkan di awal periode. Persentase rasio efisiensi pada tahun 2020-2021 berada di atas angka 99,05% menunjukkan bahwa pemerintah Desa Karangtinoto mampu mencapai target kebijakan atau tujuan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dideskripsikan menggunakan pendekatan *value for money* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai kinerja keuangan dan menentukan tingkat keberhasilan pemerintah Desa Karangtinoto, mengacu pada tiga hal. Pertama, pengukuran dilakukan dari segi ekonomis, yaitu dengan membandingkan anggaran belanja dan realisasi belanja desa. Kedua, pengukuran dilakukan dari segi efektifitas, yaitu membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan desa. Ketiga, pengukuran dilakukan dari segi efektivitas, yaitu membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan desa. Agar dapat mengukur ketiga hal tersebut, maka organisasi sektor publik harus mengetahui tingkat *input, output dan outcome*. Dibawah ini merupakan rekapitulasi perhitungan rasio ekonomis, efektivitas dan efisiensi pemerintah Desa Karangtinoto tahun 2020-2021.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah

Desa Karangtinoto Tahun 2020-2021

Tahun	Ekonomis		Efisiensi		Efektivitas	
	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria
2020	94,43	Cukup Ekonomis	98,14	Efisien	97,75	Cukup Efektif
2021	95,85	Cukup Ekonomis	99,15	Efisien	100,34	Efektif
Rata-rata	95,14	Cukup Ekonomis	98,65	Efisien	99,04	Cukup Efektif

Sumber : Pemerintah Desa Karangtinoto, Tahun 2022, data diolah

Pengukuran *value for money* dalam sektor publik menjelaskan bahwa setiap rupiah dana publik harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif., maka dari itu penting untuk menghargai satu rupiahpun atas dana tersebut. Tabel diatas menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangtinoto melalui pendekatan *value for money* dari segi ekonomis untuk dua tahun anggaran dari tahun 2020 – 2021 termasuk dalam kategori cukup ekonomis dengan rata-rata 95,14%. Ekonomis menurut organisasi sektor publik erat kaitannya dengan anggaran yang dihemat dalam upaya perolehan *output*. Angka 95,14% menunjukkan arti bahwa dalam mengelola anggaran, pemerintah Desa Karangtinoto telah melakukan penghematan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangtinoto melalui pendekatan *value for money* dari segi efisien untuk dua tahun anggaran dari tahun 2020 – 2021 termasuk dalam kategori efisien dengan rata-rata 98,65%. Hal tersebut terjadi karena dalam membiayai kegiatan pemerintah desa, pemerintah Desa Karangtinoto sudah bisa meminimalkan anggaran serta terdapat perencanaan dan pengendalian yang baik pada belanja dalam hal pengadaan barang dan jasa. Dari tahun ke tahun, pemerintah Desa Karangtinoto berupaya untuk meningkatkan efisiensinya, sehingga realisasi belanja yang digunakan pada tahun 2020 dan 2021 lebih rendah nilainya dari anggaran pendapatan yang diterima. Efisiensi berkaitan dengan konsep produktivitas. Hal tersebut dapat terwujud bila program yang menjadi sasaran dapat diwujudkan dengan sumber daya dan biaya yang seminimal mungkin.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangtinoto melalui pendekatan *value for money* dari segi efektivitas untuk dua tahun anggaran dari tahun 2020 – 2021 termasuk dalam kategori cukup efektif dengan rata-rata 99,04%. Dalam kurun waktu dua tahun, pengukuran kinerja keuangan ditinjau dari segi efektivitas mengalami peningkatan. Artinya semakin tinggi persentase rasio efektivitas, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan yang diharapkan sehingga anggaran dapat tepat sasaran. Konsep efektivitas dalam

organisasi sektor publik mengukur seberapa sukses suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Pembahasan Kinerja Non Keuangan

Penelitian ini akan menilai kinerja non keuangan pemerintah Desa Karangtinoto dengan melihat manfaat yang dirasakan masyarakat setempat dari pembangunan berdasarkan tujuan dari program prioritas pemerintah desa. Analisis data yang telah dilakukan dijelaskan sebagai berikut:

Prioritas Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di desa baik aparat desa ataupun masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Desa Karangtinoto juga turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kepala desa, bendahara desa serta masyarakat Desa Karangtinoto, penyusunan perencanaan pembangunan memang sudah dilaksanakan secara partisipatif karena melibatkan masyarakat dalam hal musyawarah pembangunan desa dengan topik bahasan kegiatan pembangunan apa saja yang akan berjalan. Akan tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung atau bahkan yang sudah terlaksana. Hal ini karena kurangnya koordinasi oleh Ketua RT kepada masyarakat. Sehingga terdapat warga dari dusun yang berbeda terhadap pelaksanaan pembangunan tidak mengetahui bahwa pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Karangtinoto meskipun pada akhirnya pembangunan tersebut bermuara pada kebermanfaatan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sudah merasakan manfaat dari program yang telah dilaksanakan. Namun masih terdapat warga yang tidak mengetahui tentang program yang sudah berlangsung, hal ini terjadi karena ia tidak merasakan manfaat dari program prioritas akibat tidak berada di sekitar area pembangunan program tersebut.

KESIMPULAN

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangtinoto dilihat dari segi ekonomi termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada pada presentase 95,14%. Hal ini berarti Pemerintah Desa Karangtinoto sudah mampu mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangtinoto dilihat dari segi efisiensi termasuk dalam kategori efisien karena berada pada presentase 98,65%. Hal ini berarti Pemerintah Desa Karangtinoto sudah melaksanakan dengan baik perihal perencanaan dan pengendalian belanja desa. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangtinoto dilihat dari segi efektivitas termasuk dalam kategori

cukup efektif karena berada pada presentase 99,04%. Hal ini berarti Pemerintah Desa Karangtinoto berhasil dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada saat proses perencanaan. Pemerintah Desa Karangtinoto sudah berhasil dalam melaksanakan pembangunan yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir angka kemiskinan. Hal tersebut sudah sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Karangtinoto. Namun masih terdapat warga yang tidak mengetahui adanya program tersebut, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara ketua RT denganarganya.

Saran

Pemerintah Desa Karangtinoto diharapkan mampu mengendalikan biaya agar sesuai dengan nominal yang dianggarkan. Dengan demikian Pemerintah Desa Karangtinoto mampu mempertahankan atau lebih dapat meningkatkan kinerja keuangan dari segi ekonomis. Pemerintah Desa Karangtinoto diharapkan mampu mempertahankan atau dapat meningkatkan kinerja keuangan dari segi efisiensi dengan melakukan penghematan dalam pembelian barang atau jasa serta meninjau kembali perencanaan belanja pemerintah desa. Pemerintah Desa Karangtinoto diharapkan mampu mempertahankan atau dapat meningkatkan kinerja keuangan dari segi efektifitas. Karena efektivitas suatu program dapat mengalami peningkatan jika masyarakat setempat merasa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka dan berakibat pada kepuasan masyarakat. Pemerintah Desa Karangtinoto diharapkan lebih dapat memaksimalkan anggaran belanja pada bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Desa Karangtinoto kurang produktif dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. Program kegiatan untuk memaksimalkan anggaran dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan untuk kelompok ibu PKK melalui usaha pengemasan beras 3 kg agar lebih ekonomis dan menggunakan aroma pandan agar lebih diminati oleh masyarakat di perkotaan. Dengan begitu masyarakat Desa Karangtinoto mempunyai penghasilan lain selain hasil panen yang dapat menunjang perekonomian. Pemerintah Desa Karangtinoto diharapkan mampu memaksimalkan peruntukan anggaran di setiap bidang yang terdapat pada belanja desa. Dengan demikian, anggaran dapat terserap dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Karangtinoto diharapkan melengkapi data-data yang ada di web desa. Hal ini bertujuan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pemerintahan

Jurnal Sustainable

Vol. 02, No. 2, November, 2022

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index>

desa.

E-ISSN : 2807-7318, P-ISSN: 2808-3482

Keterbatasan Penelitian

Peneliti tidak mengetahui keseluruhan proses dari pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sehingga dapat diasumsikan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020-2021 adalah benar. Peneliti tidak mengetahui secara langsung akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah desa karangtiinoto, sehingga diasumsikan akuntabilitas dan transparansi sudah tercakup kedalam pelaksanaan realisasi APBDes. Pemerintah Desa Karangtino hanya mampu memberikan data realisasi APBDes selama 2 tahun, dikarenakan laporan realisasi APBDes tahun sebelumnya dibawa oleh bendahara lama dan bendahara tersebut mengalami sakit parah dan tidak bisa di ganggu untuk sementara waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/> , diakses pada 23 Januari 2022 Pukul 10.50

Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Magfiroh, N., Rosyafah, S., Lestari, T., Surabaya, U. B., Money, V. F., & Ekonomi, P. (2021). Analisis Penerapan Pengukuran Value for Money pada APBDes dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa Parengan Kecamatan JetisKabupaten Mojokerto). *UBHARA Accounting Journal*, 1, 58-64.

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ketiga ed.). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi ed.). Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi IV ed.). Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).

Nordiawan, Atuningtyas. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Priandani, K. V., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan APBDES (Studi pada Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1-11.

Magfiroh, N., Rosyafah, S., Lestari, T., Surabaya, U. B., Money, V. F., & Ekonomi, P. (2021). Analisis Penerapan Pengukuran Value for Money pada APBDes dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa Parengan Kecamatan JetisKabupaten Mojokerto). *UBHARA Accounting Journal*, 1, 58-64.

Seran, M. S. B. (2021). Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe. *Jurnal Ilmiah Ilmu*

Jurnal Sustainable

E-ISSN : 2807-7318, P-ISSN: 2808-3482

Vol. 02, No. 2, November, 2022

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index>

Administrasi, 4(1), 94–101. <http://ojs.stiami.ac.id>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yuliansyah dan Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.